

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA KOTA PADANG
TAHUN 2008**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh :

DANNI TRI PUTRA
BP : 05193017



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

ABSTRAK

Danni Tri Putra, 05193017, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2009. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2008. Halaman i-xi, 84. Referensi 1 skripsi, 17 buku, 2 jurnal, 1 koran, 5 *website*.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang telah dilaksanakan pada tanggal 23 oktober 2008. Berbagai permasalahan muncul setelah pelaksanaan pilkada, salah satunya adalah rendahnya partisipasi politik masyarakat, ini disebabkan oleh besarnya jumlah pemilih yang terdaftar tidak menggunakan hak pilihnya atau lebih umum dikenal dengan istilah golput.

Dalam penelitian ini ingin menjelaskan faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Walikota Kota Padang Tahun 2008, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pilkada Kota Padang tahun 2008 dan menganalisis faktor-faktor penyebab tersebut. Penelitian ini sangat penting dan sangat menarik untuk dilakukan mengingat dari waktu ke waktu angka golput semakin tinggi di Indonesia.

Pencarian data dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif. Proses pengambilan data menggunakan teknik wawancara dan juga analisis terhadap literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara bersifat mendalam (*indepth interview*) dan terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan terdiri atas informan kunci yaitu *non-voter* di Kecamatan Koto Tengah, Kuranji dan Lubuk Begalung dengan teknik *accidental sampling* yang kebetulan dilakukan apabila pemilihan anggota sampelnya terhadap orang atau benda yang kebetulan ada atau dijumpai sedangkan informan lain sebagai pelengkap data primer yang diperoleh dari informan kunci terdiri dari anggota KPUD Kota Padang dan PPK Kecamatan yang dipilih secara *purposive sampling*.

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa alasan informan tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2008 adalah: malas, tidak ada calon yang disukai, berdagang, tidak di Padang, tidak tahu visi dan misi calon dan tidak mengetahui calon. Dari penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik pada Pilkada Kota Padang yaitu (1) faktor kesadaran politik (2) faktor kepercayaan politik dan (3) faktor latar belakang sosial dan ekonomi.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat, Pilkada Kota Padang Tahun 2008.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi
- b. Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten
- c. Walikota dan Wakil Walikota untuk kota

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebutkan tentang pemilihan Kepala Daerah Langsung yang diatur dalam pasal 56 ayat 1:

"Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil"

Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa:

"Pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik (koalisi)"¹.

¹ UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 ayat 1 dan 2.

Pelaksanaan pilkada langsung memberikan kesempatan bagi rakyat agar dapat memilih langsung kepala daerah mereka yaitu, gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten serta walikota dan wakil walikota untuk kota, masyarakat tidak lagi menerima saja kepala daerah yang dipilih oleh perwakilan mereka di DPRD, tetapi mereka mempunyai peran langsung dalam proses pemilihan tersebut.

Dengan sistem pemilihan langsung ini sangat diharapkan dapat mendatangkan suasana baru dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia dan dalam masyarakat Sumatera Barat khususnya. Pemilihan Kepala Daerah pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2008 itu dimenangkan oleh pasangan Fauzi Bahar-Mahyedi yang dicalonkan dari koalisi antara Partai Amanat Nasional dengan Partai Keadilan Sejahtera. Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung itu pasangan Fauzi Bahar-Mahyedi memperoleh suara terbanyak, yaitu sebanyak 156.339 suara, pasangan yang diusung koalisi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, atau sekitar 51,53 persen². Berikut tabel hasil perolehan suara Pilkada Walikota/Wakil Walikota Padang tahun 2008:

² Laporan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang 2008 Tingkat KPUD Kota Padang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui ternyata yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pilkada kota padang tahun 2008 yang lalu adalah:

- 1) Faktor Kesadaran Politik, meliputi kepribadian masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Terlihat dalam sikap masyarakat yang tidak ingin menggunakan hak pilihnya. Banyak dari informan yang malas untuk datang ke TPS dan tidak ingin melakukan pencoblosan pada saat pilkada dilaksanakan. Mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka daripada memikirkan nasib bangsa dan negara pada umumnya dan khususnya kota padang. Ini jelas terlihat dari alasan-alasan yang mereka utarakan seperti pekerjaan sebagai kuli bangunan yang tidak ada waktu libur sebelum pekerjaan mereka selesai. Keperluan masyarakat untuk keluar kota sebelum atau pada saat pilkada berlangsung juga menjadi faktor penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat. Profesi masyarakat yang berbeda-beda tidak berpengaruh terhadap kemauan mereka untuk tidak ikut dalam pilkada. Faktor pekerjaan atau profesi yang dilakukan masyarakat sehari-hari menjadi sangat berpengaruh terhadap rendah atau tingginya kesadaran politik masyarakat.

- 2) Faktor Kepercayaan Politik, meliputi pandangan masyarakat terhadap para calon walikota dan wakil walikota dan terhadap kinerja pemerintah sebelumnya. Banyak dari informan yang menyatakan ketidaksukaannya kepada pasangan calon. Dari faktor kepercayaan politik ini informan memandang bahwa kandidat yang ada tidak memiliki visi dan misi yang jelas serta tidak adanya kandidat yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Semua informan yang ditemui memiliki kepribadian sinisme terhadap calon kepala daerah dan pemerintahan saat ini. Alasan-alasan yang mereka kemukakan seperti ketidakpercayaan mereka terhadap calon yang ada karena calon yang ada tidak ada yang pantas untuk menjadi pemimpin, tidak adanya calon yang betul-betul berjuang untuk rakyat dan tidak adanya kandidat yang membuktikan janji-janji mereka pada saat kampanye. Kandidat yang ada hanya akan mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri tanpa memikirkan kepentingan rakyat. Tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan tidak membedakan informan pada pilihannya untuk menjadi golput. Semua informan yang ditemukan memiliki alasan yang sama dalam menilai kandidat yang akan memimpin mereka.
- 3) Faktor Sosial Ekonomi, kebanyakan dari *non-voter* melihat kepada untung rugi terhadap dirinya, dari penghasilan dan pekerjaan mereka. Mereka yang mempunyai pendidikan tinggi, penghasilan memadai dan tempat kerja yang berpenghasilan cukup menjadi *non-voter* karena

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi sanit, 1992. *Aneka Pandangan Fenomena Golput*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP1), 1991. *Jurnal Ilmu Politik 11*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- BN. Marbun, SH, 1996. *Kamus Politik*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Deddy Mulyana, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Dr. Husaini Usman, M. Pd. dan Purnomo Setiadi Akbar, M. Pd. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Dr. Prasetya Irawan, 1999. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Emam Hermawan, 2001. *Politik Membela Yang Benar*. Yogyakarta. KLIK.
- Harold J. Laski, 1974. *The State In Theory And Practice (New York: The Viking Press)*.
- Inu Kencana, 1997. *Ilmu Politik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ir. Drs. Bonar Simangunsong, Msc, SE, 2004. *Negara, Demokrasi dan Berpolitik yang Profesional*. Jakarta. Gramedia.
- Lexy J. Moleong, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Mardalis, 1993. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Masri Singarimbun, 1989. *Metode Penelitian Survey*, Yogyakarta: LP3ES.
- _____ & Sofyan Efendi (ed), 1989. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta:LP3ES.
- Miriam Budiarmo, 1998. *Partisipasi dan Partai politik*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- _____, 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.